

**RESPON MASYARAKAT
TENTANG IKLAN CONTRENG VERSI KPU
(Studi Pada Anggota Masyarakat Kelurahan Bibis Tama
Kecamatan Tandes Kota Surabaya)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Sosial Dalam Bidang Ilmu Komunikasi**



PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
NO. KLAS R D-2009 034 Kom	NO REG : D-2009/Kom/034 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

FAUZIA KOMALA WARDHANI
NIM. B06205034



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS DAKWAH
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
2009**

Gajah Belang

- Jl. Jemur Wonosari Lebar No. 24 ☎ 031 - 8439177
- Gebang Lor No. 6 ☎ 031 - 5952789

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh **FAUZIA KOMALA WARDHANI** ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 15 Juli 2009

Pembimbing,



Nikmah Hadiati Salisah, S.Ip, M.Si

NIP. 197301141999032004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh Fauzia Komala Wardhani ini telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 18 Agustus 2009

Mengesahkan
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Dakwah



Dekan,

Prof. Dr. H. Shonhadji, Dip. Is

NIP. 195808071986031002

Ketua,

Nikmah Hadiati Salisah, S. Ip, M. Si

NIP. 197301141999032004

Sekretaris,

Husnul Muttaqin, S. Sos

NIP. 197801202006041003

Penguji I,

Drs. M. Hamdun Sulhan, M. Si

NIP. 19540312182031002

Penguji II,

Lilik/Hamidah, S. Ag, M. Si

NIP. 197312171998032002

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	42
Tabel 4.1	54
Tabel 4.2	55
Tabel 4.3	56
Tabel 4.4	57
Tabel 4.5	58

penominasian kandidat. Individu-individu biasa kemudian menjadi politisi sejak dirinya bergabung dalam partai politik sejak dinominasikan atau mencalonkan diri dalam pemilu. Kedua, membentuk pemerintahan. membentuk pemerintahan secara langsung terjadi di negara-negara yang menganut sistem presidensiil seperti negara Amerika dan Perancis dimana eksekutif dipilih langsung. Sedangkan pada pemerintahan dengan sistem parlementarian pemilu lebih mempengaruhi formasi pemerintah dimana derajat mempengaruhinya tergantung pada sistem pemilu yang digunakan. Ketiga, sarana membatasi perilaku dan kebijakan pemerintah. Penguasa-penguasa yang agendanya tidak lagi disetujui rakyat maka dapat dikontrol perilakunya secara periodik dalam pemilu berikutnya. Incumbent dapat dihukum oleh rakyat melalui pengalihan dukungan suara kepada kandidat atau partai lain yang dianggap lebih aspiratif.

Dalam perspektif *top-down*, pemilu dilihat sebagai sarana elit melakukan kontrol terhadap rakyat agar tetap tanpa gerak/diam (*quiescent*), dapat ditundukkan (*malleable*) dan pada akhirnya dapat diperintah (*governable*). Fungsi ini biasanya terjadi terkait dengan penguasa-penguasa otoriter. Dalam pemerintahan yang otoriter pemilu dilaksanakan untuk membangun legitimasi atas sistem yang mereka bangun. Selain itu, pemilu juga menjadi sarana dimana elit dapat memanipulasi dan mengontrol massa. Masuk dalam perspektif *top-down* fungsi pemilu adalah: pertama, memberi legitimasi kekuasaan. Fungsi ini merupakan fungsi paling mendasar dalam pemilu. Penguasa yang terpilih

Dengan sistem baru ini, bagi sebagian besar masyarakat Indonesia pasti sangatlah masih asing dengan cara baru dalam pemilihan ini, apalagi kata *contreng* yang disosialisasikan tidak terdapat pada kamus ilmiah bahasa Indonesia serta bukan bahasa yang umum digunakan oleh warga negara Indonesia. Mungkin saja banyak yang bingung karena kalimat tersebut masih terasa asing. Secara pribadi, Choirul Anam anggota KPU kota Surabaya mengatakan beberapa alasan mengapa cara penyuaaraan menggunakan *contreng/centang*; negara yang memakai sistem *coblos* adalah merupakan reprintsasi dari masyarakat dari negara tersebut bahwa warga negara yang memakai cara *mencoblos* adalah negara yang tingkat penduduknya tidak bisa membaca tinggi, karena hanya melihat gambar lalu di *coblos*. Alasan lain yang dikemukakan adalah karena alat dipakai *mencoblos* adalah paku maka mempunyai anggapan bahwa negara tersebut menyukai hal-hal yang berbau kekerasan. Dengan adanya peraturan baru tersebut diharapkan membuat negara Indonesia semakin berbudaya, karena hanya ada dua negara (termasuk Indonesia) yang mempunyai sistem *mencoblos*.

Demi suksesnya acara pesta demokrasi 5 tahunan, KPU merasa harus memberitahu peraturan yang paling baru saat memilih. Dengan jalan menyosialisasikan peraturan tersebut melalui iklan, baik iklan di televisi, radio maupun surat kabar. Tidak hanya melalui iklan, KPU juga memasang *baliho*, *spanduk* dll.

Rosengren juga memperkenalkan konsep persoalan yang terjadi melalui interaksi antara kebutuhan karakteristik individu, dan kondisi lingkungan sosialnya. Tingkat kerumitan persoalan akan berbeda antara satu individu dengan individu lainnya, hal serupa berlaku pula dalam persepsi mengenai bagaimana persoalan tersebut dapat diselesaikan. Pada tingkat individual, persoalan-persoalan yang dirasakan dan solusinya memberikan motif untuk bertindak.

Meskipun motif mungkin sulit dipisahkan dan dibedakan dari kebutuhan dan persoalan, terutama dalam penelitian empiris, namun motif dapat diarahkan kepada berbagai tujuan pemenuhan atau mengenai hal ini: mengalami situasi sosial tertentu yang penuh dengan konflik dan tekanan, individu akan memiliki motif untuk relaks dengan mengkonsumsi media, individu sadar akan adanya persoalan-persoalan dalam masyarakat, oleh karenanya termotivasi untuk mencari informasi untuk mendapatkan orientasi melalui media massa; individu kurang memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan interaksinya secara wajar (nyata) akan termotivasi untuk menggunakan jenis media tertentu (misalnya sebuah iklan).

Dengan demikian, persoalan yang membawa pada motif tertentu akan menyebabkan tindakan dalam bentuk konsumsi media atau perilaku lainnya. Karena kebutuhan, persoalan dan motif berbeda bagi individu atau kelompok yang berbeda, maka hasilnya adalah pola-pola perilaku yang berbeda pula. Sejumlah orang akan mencari sesuatu yang menghibur,

secara berbeda-beda dengan karakteristik pribadi dari anggota audience. Teorinya ini secara eksplisit telah mengakui adanya intervensi variable-variabel psikologi yang berinteraksi dengan terpaan media masa dalam menghasilkan efek[2]. Berangkat dari teori perbedaan individu dan Stimulus respons ini ia mengembangkan model psikodinamik yang didasarkan pada keyakinan bahwa kunci dari persuasi yang efektif yang terletak pada modifikasi struktur psikologi internal dan individu. Melalui modifikasi inilah respon tertentu yang diharapkan muncul dalam perilaku individu akan tercapai. Esensi dari model ini adalah fokusnya pada variable-variabel yang berhubungan dengan individu sebagai penerima pesan, suatu kelanjutan dari asumsi sebagai akibat dan mendasarkan pada perubahan sikap sebagai ukuran bagi perubahan perilaku.

Teori efek komunikasi massa stimulus respons diibaratkan seorang anak yang disuntik dengan obat ke dalam pembuluh darahnya yang kemudian ia (audience) akan bereaksi seperti yang diinginkan. Prinsip stimulus respon mengasumsikan bahwa pesan informasi dikondisikan oleh media dan didistribusikan dalam skala yang cukup luas. Sehingga secara serempak pesan tersebut dapat diterima oleh sejumlah individu, bukan ditujukan pada individu per individu. Kemudian sejumlah besar individu tersebut akan merespon pesan informasi itu. Bungin mengutip pendapat Mc Quail yang menjelaskan bahwa elemen-elemen utama dari teori stimulus respon adalah a) pesan ; b) penerima, dan c) efek Pesan Amat banyak pesan yang terdapat dalam tayangan tersebut. baik itu berupa pesan verbal maupun non-verbal. Pesan verbal misalnya kata-kata mesra, romantis, ataupun kata-kata manja. Sedangkan pesan non verbal yang

nama calon saja). Kedua, kapan Pilpres 2009 dilaksanakan/ayo ke TPS (8 Juli 2009). Ketiga, substansi dari Pilpres 2009 (saatnya rakyat berdaulat untuk menentukan nasibnya lima tahun ke depan). KPU hanya memproduksi satu iklan layanan masyarakat yang akan ditayangkan dalam dua versi. Iklan layanan masyarakat ini akan ditayangkan di delapan stasiun televisi nasional dengan jumlah tayang 640 spot. Pembiayaan Iklan ini seluruhnya berasal dari APBN. Selain lewat iklan di televisi, KPU juga membuat iklan layanan masyarakat Pilpres 2009 di media cetak dan radio yang isi pesannya sama dengan isi pesan iklan Pilpres 2009 yang ada di televisi. Selain lewat iklan layanan masyarakat, KPU telah dan akan terus mensosialisasikan Pilpres 2009 lewat tatap muka, penyebaran materi dan mobilisasi sosial Pilpres 2009.

Tata cara penandaan menjadi fokus sosialisasi karena pada Pilpres 2009 cara menandai surat suara berbeda dengan pemilu legislatif. Pada Pilpres 2009, menandai lebih dari satu kali pada satu pasangan calon dianggap tidak sah. Berbeda dengan Pemilu Legislatif, menandai lebih dari satu kali, yaitu pada lambang parpol dan pada nomor urut atau nama caleg dianggap sah. Peluncuran iklan masyarakat ini dalam rangka pendidikan pemilu, bertujuan mengembangkan kepercayaan dan pengertian atas proses pemilu.

Hal ini mencakup penyampaian informasi kepada pemilih pada umumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemilu seperti UU Politik, UU Pemilu, UU Pemilihan Presiden, mekanisme pemilihan, dan bagaimana proses pemberian suara pada hari pemilu itu. Tujuan kedua ialah untuk memotivasi kelompok-kelompok tertentu-perempuan, pemilih pertama kali, orang miskin di perdesaan

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, iklan conteng yang dibuat oleh KPU merupakan iklan layanan masyarakat yang dibuat dalam rangka mengedukasi pemilih akan peraturan baru yang ditetapkan DPR dalam memilih. Tujuan lain adalah mengingatkan dan mengajak masyarakat agar turut aktif dalam pesta demokrasi. Iklan yang dibuat oleh KPU tidak hanya berupa iklan di televisi, namun berupa poster, spanduk, baliho dll. Termasuk juga sosialisasi langsung ke masyarakat. Dana yang dipakai untuk pembuatan iklan layanan masyarakat ini, sepenuhnya berasal dari APBN.

Iklan conteng tidak hanya KPU saja yang membuat, dalam pemilu legislatif banyak partai yang ikut 'membantu' mensosialisasikan cara memilih. Namun, iklan yang dibuat oleh partai politik adalah bukan kategori iklan layanan masyarakat, melainkan kategori iklan politik. Karena isi dalam iklan tersebut merupakan ajakan untuk memilih partai itu. Contoh yang dipakai bagaimana menconteng pun memakai partai yang membuat.

Iklan yang dibuat oleh KPU tidak hanya melulu mengenai bagaimana mencoteng dan ajakan untuk ikut pemilu, ada juga iklan yang mempunyai isi agar mengecek apa telah terdaftar dalam daftar pemilihan sementara di kelurahan, iklan ini mempunyai judul iklan 'Pemutakhiran Nama Pemilih'. Namun fokus penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah

Gratifications bisa dikaitkan dalam penelitian disini, karena memfokuskan pada keinginan masyarakat dalam mencari sesuatu yang menarik perhatiannya. Karena pendekatan *Uses and Gratifications* memandang pada hubungan antara isi yang disampaikan oleh media dengan pemirsa yang melihat di media. Maka, masyarakat yang mempunyai perhatian akan tata cara pengambilan suara yang baru, dari coblos menjadi contreng membuat masyarakat mencari tahu lebih banyak bagaimana itu mencontreng. Jalan yang diambil untuk mengetahui informasi tentang tata cara baru tersebut adalah dengan melalui saluran media, selain bertanya pada yang ahli atau yang paling mengetahui.

Iklan layanan masyarakat ini berkaitan dengan Teori *S-O-R* karena mungkin KPU juga memperhitungkan efek yang diberikan oleh media massa.. Karena respon yang menjadi target iklan ini mempunyai sifat yang massiv, selain tidak hanya para penonton menjadi tahu bagaimana cara memilih yang terbaru, hari dan tanggal pemilihan umum dilaksanakan, para partai politik pun turut terilhami cara sosialisasi melalui iklan di media. Sehingga media di manfaatkan untuk mensosialisasikan pemilu. Respon yang dihasilkan bisa berupa mengikuti anjuran untuk memilih atau mengabaikan anjuran yang terdapat dalam iklan

Iklan contreng yang ada di televisi yang dibuat baik oleh KPU maupun yang dibuat oleh partai politik merupakan iklan yang pertama kali ada dalam sejarah per-politikan yang ada di Indonesia. Dalam pemilu-pemilu sebelumnya stimulus yang diberikan biasanya hanya berasal dari

